

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Beberapa daerah-daerah di Jakarta belum lama ini sering dilanda banjir yang parah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penginapan Umum-Balai Besar Ciliwung Cisadane *Waterway Bowl* rencana program peningkatan jangka menengah teritorial. Untuk Melaksanakan program standarisasi aliran Ciliwung, pemerintah pusat membutuhkan ruang dan lahan untuk menambah aliran air dan membangun jalan tinjauan. Pemerintah Kota DKI Jakarta (Pemda Jakarta) Khusus Program Standarisasi Perairan Ciliwung Dalam Pedoman Pimpinan DPRD DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012 tentang pengusaan penataan/penugasan tanah untuk penyelenggaraan kemajuan di masyarakat minat ikuti rencana aliran ciliwung pintu manggarai-kampung melayu (Pergub Nomor 163 Tahun 2012). Permasalahan utama dalam kebijakan Pemda Jakarta ketika melaksanakan proyek pembangunan untuk kepentingan umum berupa menormalisasikan kali ciliwung, mempunyai dua tindakan yang berbeda, yaitu antara pasal yang dibuat dengan tindakan faktual tidak sama. Pemda Jakarta melakukan tindakan faktual untuk melaksanakan program normalisasi yang dasar hukumnya sudah habis masa berlakunya. Fakta dalam lapangan adalah ketika kebijakan yang ditetapkan dalam perda nomor 1 tahun 2012 jo yang isinya “bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara, maka pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang”, Jika Pergub Nomor 163 Tahun 2012 dan Dokumen Perencanaan Proyek Normalisasi kali Ciliwung adalah pengadaan tanah. Sebenarnya pemakasaan, kekuatan, dan wewenang secara tegas diidentikan dengan intimidasi yang antara lain di tunjukkan dengan persetujuan yang sah.

Fakhrul Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

Kewenangan perangkat negara harus dipraktekkan oleh hukum. Kekuasaan untuk mengarahkan ditegaskan oleh negara di dalam hukum publik. Negara biasanya menyelesaikan hubungan yang sah seperti hal-hal individu juga. Keterkaitan antara hukum negara dan tanah di atur

Fakhrul Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)] – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id)]

sebagai barang dipergunakan untuk umum, misalnya jalan umum yang bersinggungan dengan negara dan tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, misalnya tempat usaha pemerintah, sehingga tanah mempunyai tempat dengan negara itu sendiri, Pengertian “harta milik negara” tidak hanya dilandasi oleh kekuatan-kekuatan yang dikendalikan oleh hukum, tetapi menggabungkan kemampuan dengan kemampuan mengharapkan hak hidup dan komitmen. Negara dipandang sebagai subyek sah serupa dengan penduduk. Sehingga dalam latar belakang ini adalah melihat dari dokumentasi yang dibuat oleh beberapa pihak terkait, tetapi penulis berangkat pertama kali dari pemikiran penulis ketika selesai melihat vidio yang ada dalam youtube yang berjudul “*Jakarta Unfair*” yang didalam vidio tersebut bahwa banyak sekali penggusuran yang terjadi di DKI Jakarta di berbagai wilayahnya (Gunawan, 2016). Penulis melihat dari reka adegan yang dibuat, oleh karena itu penulis berfikir apakah benar murni tidak ada kepentingan di balik itu semua selain mengatasnamakan yang dikenal sebagai “*Normalisasi Ciliwung*” yang banyak sekali penulis melihat dari vidio tersebut bahwasannya orang-orang yang ada didalam penggusuran tersebut mengalami banyak kerugian dan seakan-akan mereka tak berdaya dibawah konflik tersebut, semua ada dibawah kewenangan kekuasaan di wilayah tersebut.

Sebenarnya dalam pasal 2 Pergub 163 tahun 2012 yang di maksud pada “Penguasaan perencanaan/peruntukan tanah untuk pelaksanaan pembangunan Rencana Trace Kali Ciliwung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum\TI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung, dari bangunan hunian, makam serta benda- benda yang berada di atasnya dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Yang akan saya teliti adalah dari isi ini karena masih banyak yang salah mengartikan untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, ini banyak sekali pertentangan dan mereflesikan adanya ketidakefektifan pelaksanaan

Fakhrul Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)] – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id)]

kebijakan yang perlu di kaji kembali seperti halnya, di dalam isi pasal ini mengatakan “mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan di lapangannya masyarakat sangat

Fakhrul Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)] – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id)]

sekali menderita dan mayoritas tidak mengetahui sebelumnya tentang isi Pergub 163 tahun 2012 ini dan sampai dengan pasal 2 yang penerapannya sangat tidak merefleksikan hak kemanusiaan yang terjadi khususnya di kampung Bukit Duri yang penulis amati.

Oleh karena itu saya mengangkat isu penggusuran warga Bukit Duri yang sangat berkaitan dengan Pergub 163 tahun 2012. Dengan adanya kebijakan tersebut banyak sekali pertentangan dari warga setempat, dikarenakan penerapan kebijakan sangat tidak efektif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang terlibat, seperti halnya mensosialisasikan kebijakan terlebih dahulu di dalam isi kebijakan, tetapi didalam lapangannya mereka merasakan tidak ada sosialisasi atau mobilisasi dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam penggusuran di kampung Bukit Duri. Dalam proposal ini membahas tentang kepentingan Pergub 163 tahun 2012 sangat menjadi krusial karena pelaksanaan yang terjadi didalam Pergub 163 tahun 2012 itu memberikan dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat yang terlibat, oleh karena itu penulis mulai meneliti didalam proposal penulis ini terkait dengan formulasi kebijakan Pergub 163 tahun 2012, melihat banyak aktor yang ada dalam formulasi kebijakan Pergub yang kemungkinan besar bermain di balik kebijakannya, karena dalam kebijakan tersebut tidak begitu jelas dalam isinya dan masih banyak pengartian dan makna yang berbeda didalamnya. Yang berisi kebanyakan bahwa lahan yang di pakai sebagai Trace Kali Ciliwung dalam kebijakan 163 tahun 2012 itu, memberikan ketidakpastian hanya di katakan “menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung, dari bangunan hunian, makam serta benda-benda yang berada di atasnya dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan yang terjadi sebenarnya dilapangan bahwa mereka yang tanahnya dibebaskan/kosongkan tanah/lokasi yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta itu tidak ada pergantian rugi sama sekali, padahal banyak sekali

Fakhrul Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)] – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id)]

masyarakat yang mempunyai hak untuk hidup didaerah khususnya kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan.

## **1.2 PERTANYAAN PENELITIAN**

Fakhrul Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)] – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id)]

Merujuk pada latar belakang di atas penelitian ini berusaha melihat lebih jauh fenomena terkait apakah ada kepentingan lainnya di balik penggusuran tersebut dan juga berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana proses formulasi kebijakan Pergub DKI Jakarta No.163 rencana trace kali ciliwung?
- Sejauh mana keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat dalam formulasi kebijakan tersebut?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses formulasi kebijakan Pergub DKI Jakarta 163 Rencana Trace Kali Ciliwung. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat dalam formulasi kebijakan tersebut.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, bagi:

- **Akademisi:** Sebagai masukan dan sumbang saran secara akademis dalam implementasi kebijakan penataan ruang. Sehingga memberikan manfaat dalam pengetahuan untuk mengetahui kebijakan yang tentang penataan ruang dan dampak dari politik kepentingan.
- **Praktis:** Sebagai refrensi dan bahan komparasi pembelajaran dalam bidang penilitian dan pengetahuan tentang subtansi hasil penelitian.

### **1.5 SISTEMATI**

#### **KA PENULISAN BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Fakhrul Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)] – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id)]

Dalam bab ini, berisi tentang signifikansi penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini, akan berisi tentang kajian-kajian terdahulu yang memiliki

Fakhrul Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)] – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id)]



topik masalah yang serupa dengan topik yang diambil oleh peneliti, serta berisi tentang konsep-konsep dasar yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dan kerangka berpikir penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan tempat penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan memaparkan temuan di lapangan sesuai dengan latar belakang permasalahan, yaitu efektivitas implementasi kebijakan tata ruang rencana trace kali ciliwung kasus Pelaksanaan PERGUB DKI Nomor 163 Tahun 2012, dan mencoba menjawab serta menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang menjawab permasalahan dan penyelesaian penelitian, sedangkan saran merupakan alternatif untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan yang ada berkaitan dengan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan peneliti untuk menyusun proposal penelitian.